

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN  
TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator  
Bidang .....

Sub Koordinator  
Bidang .....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP. ....

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP. ....

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

**RIPTO SUSILO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 198703 1 001

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator Bidang,  
Pembangunan Manusia Dan  
Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia Dan  
Pemerintahan

**RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM**  
NIP. 19730501 199603 2 004

**SISTARI SUBIARTINAH,SE,MM**  
NIP.19640321 199010 2 002

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2023**

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 24 Mei 2022

Koordinator Bidang,  
Pembangunan Manusia Dan  
Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia Dan  
Pemerintahan

**RINAWATI HERI PRASTUTI,SE,MM**  
NIP. 19730501 199603 2 004

**PUTRI UTAMI RAHMANIA,ST**  
NIP.19910316 201503 2 003

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DWI SUKARMEI,ST,MT**  
Pembina  
NIP. 19740508 200312 1 008

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

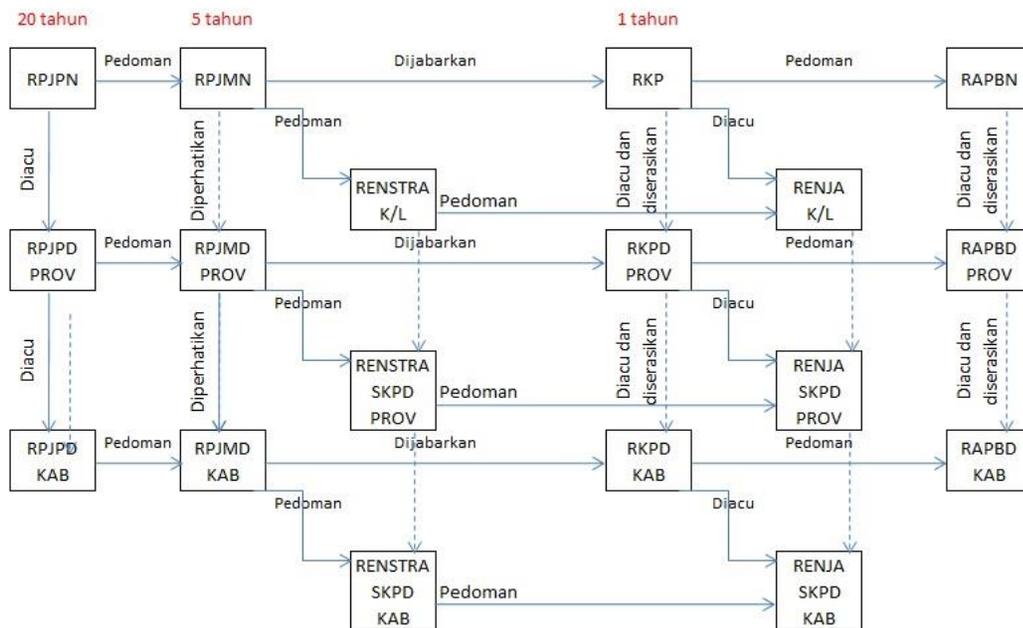
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Dasar penyusunan yang dimaksud seperti upaya pemulihan dari dampak Covid-19 baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Kledung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan

informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Kledung, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Kledung;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Kledung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Kledung;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kledung;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Kledung;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Kledung; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Kecamatan Kledung.

**b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Kledung;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Kledung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kledung.
- 2) Mengidentifikasivariabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Kledung untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Kledung.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Kledung;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Kledung Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kledung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Kledung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Kledung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Kledung dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung ;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Kledung  
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kledung.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kledung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Kledung.

Tahapan kegiatan telaah yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Kledung.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kledung. Namun dalam proses ini Kecamatan Kledung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Kledung ;**

Penyempurnaan rancangan RenjaKecamatan Kledungperlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat DaerahKabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Kledung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumenrancangan Renja Kecamatan Kledung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan KledungTahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kledung untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Kledung  
TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2021**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2021 terhadap capaian renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Kledung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Kledung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung  
s.d Tahun 2021

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satu an	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	20
<b>A</b>	<b>PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>																		
<b>1</b>	<b>Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan</b>				<b>355.930.000</b>		<b>63.412.000</b>		<b>71.000.000</b>	<b>30.927.000</b>		<b>30.927.000</b>		<b>100</b>		<b>94.339.000</b>		<b>26,50</b>	
a.	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	bulan	60	128.430.000	12	17.912.000	12	25.500.000	10.227.000	12	10.227.000	100	100	24	28.139.000	40	21,91	
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	bulan	60	227.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000	20.700.000	12	20.700.000	100	100	24	66.200.000	100	29,10	
<b>2</b>	<b>Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan</b>				<b>237.096.000</b>		<b>48.154.500</b>		<b>52.900.000</b>	<b>27.264.500</b>		<b>27.264.500</b>		<b>100</b>		<b>75.419.000</b>		<b>31,81</b>	
a.	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Terpenuhinya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	bulan	60	176.132.000	12	38.228.500	12	39.900.000	23.150.000	12	23.150.000	75	100	21	61.378.500	35	34,85	
b	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK)	Terpenuhinya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan	bulan	60	60.964.000	12	9.926.000	12	13.000.000	4.114.500	12	4.114.500	100	100	24	14.040.500	40	23,03	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

		keluarga( PKK)																	
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan</b>				<b>123.049.000</b>		<b>16.262.000</b>		<b>23.300.000</b>	<b>9.072.000</b>		<b>9.072.000</b>		<b>100</b>		<b>25.334.000</b>		<b>20,59</b>	
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	bulan	60	96.619.000	12	10.877.000	12	20.800.000	5.976.000	12	3.744.000	100	100	24	16.853.000	40	17,44	
b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Terpenuhinya Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	bulan	60	26.430.000	12	5.385.000	12	2.500.000	3.096.000	12	3.096.000	100	100	24	8.481.000	35	32,09	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan</b>				<b>109.722.000</b>		<b>17.290.000</b>		<b>16.200.000</b>	<b>41.332.000</b>		<b>41.332.000</b>		<b>100</b>		<b>58.622.000</b>		<b>53,43</b>	
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Terpenuhinya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	bulan	60	27.222.000	12	4.090.000	12	3.000.000	2.132.000	12	2.132.000	100	100	24	6.222.000	40	22,96	
b	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Terpenuhinya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	60	82.500.000	12	13.200.000	12	13.200.000	39.200.000,00	12	39.200.000	100	100	24	52.400.000	40	63,52	
		Terlaksananaya percepatan penanganan Covid-19	Desa			13		13			13		100		13		100		
<b>B</b>	<b>PENUNJANG PERENCANAAN</b>																		

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

1	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah</b>			100	31.000.000		4.985.000	27	5.000.000	2.500.000	100	2.500.000	100	100	100	7.485.000	100	24,15	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	doku men	167	31.000.000	33	4.985.000	33	5000.000	2.500.000	33	2.500.000	75,76	100	58	7.485.000	34,7 3	24,15	
<b>C</b>	<b>FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>																		
1	<b>Program pelayanan administrasi perkantora</b>			100	951.895.992	100	178.055.707	100	219.820.000	161.978.543	100	160.154.482	100	98,8 7	100	338.210.189	100	35,53	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	107.999.992	12	19.850.371	12	22.000.000,00	21.682.452	3	21.682.452	25		15	41.093.158	40	38,05	
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	60	12.202.776	12	2.192.000	12	2.300.000	2.300.000	12	2.300.000	100	100	21	4.492.000	35	36,81	
c	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Penyediaan alat tulis kantor	bulan	60	56.172.328	12	10.000.000	12	10.000.000	9.490.000	12	8.109.500	100	100	24	18.109.500	40	36,35	
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	30.500.000	12	7.500.000	12	8.000.000	6.250.000	12	6.250.000	12	100	24	13.750.000	40	45,08	
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	25.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	2.898.000	12	2.898.000	100	100	24	7.898.000	40	31,59	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	3.000.000	12	1.440.000	12	1.500.000	720.000	12	720.000	100	90,00	24	2.160.000	40	72,00	
g	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	109.500.000	12	29.571.204	12	22.000.000	16.660.000	12	16.660.000	100	100	24	36.560.000	40	33,39	
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	60	136.600.000	12	29.571.204	12	32.000.000	2.095.000	12	2.095.000	100	100,00	24	31.666.204	40	22,68	
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	60	144.000.000	12	35.000.0000	12	30.000.000	20.640.000	12	20.640.000	100	100	24	55.640.000	40	38,64	
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhinya Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	60	179.920.896	12	47.602.132	12	43.620.000	37.412.271	12	37.412.271	100	100	24	85.010.507	40	47,25	
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Terpenuhinya Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	bulan	48	144.000.000	12	0	12	43.400.000	41.830.820	12	41.830.820	100	100	24	41.830.820	50	29,05	
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>		%	<b>100</b>	<b>820.439.875</b>	<b>100</b>	<b>286.080.545</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>60.307.000</b>	<b>100</b>	<b>60.227.000</b>	<b>100</b>	<b>99,87</b>	<b>100</b>	<b>346.307.545</b>	<b>100</b>	<b>42,21</b>	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (lemari arsip dan filling kabinet)	unit	3	77.500.000	0	23.500.000	0	15.000.000	5.940.000	0	5.940.000	100	100	7	29.440.000	100	37,99	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor (printer dan sound system)	unit	1	68.940.000	12	14.940.000	1	15.000.000	14.000.000	6	14.000.000	100	100	18	28.940.000	100	41,98	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terbangunnya Gedung Arsip Kecamatan Kledung		0	402.999.875	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	49,63	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	60	69.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	12	15.000.000	100	100,00	24	30.000.000	35	43,48	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bulan	60	142.000.000	12	27.640.545	12	30.000.000	20.367.000	12	20.287.000	100	96,61	24	47.927.545	40,00	33,75	
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	bulan	60	25.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	5.000.000	12	5.000.000	100	99,99	24	10.000.000	40	40	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	60	15.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	2.500.000	12	2.500.000	100	100	24	5.500.000	40	36,67	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	60	20.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	3.000.000	12	3.000.000	100	100	24	7.000.000	40	35	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

3	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	%	100	10.000.000	100	0	100	5.000.000	5.000.000	100	4.500.000	100	90	100	4.500.000	100	45	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	40	10.000.000	0	0	20	5.000.000	5.000.000	20	4.500.000	100	90	20	4.500.000	100	45	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kledung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan 96,94 % ;
    2. Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan 100%;
  - b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 %;
    2. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah 100 %.
  - c. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 100 %;
    2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sudah 100 %;
  - d. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut:
    1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100 %;
    2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) sudah 100 %.
  - e. Program Perencanaan, Evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah.  
Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan sudah 100 %.
  - f. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor,

Pengadaan peralatan gedung kantor, Pengadaan perlengkapan rumah dinas, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor pada mencapai 100 %.

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Kledung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Kledung (**Laporan IKPD**)  
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	95,05	96,94	99,10	..		96,94	TT
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,00	0,70	0,50	0,30	0	100	100	100	..		0	TT
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	..		100	TT
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	99,31			100	
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	
6	Persentase tempat ibadah kondisi baik		75	75	75	75	75	75	75	100			100	
7	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	100	100	100	100	100	93.09	100	100	..		94,75	TT
8	Angka kriminalitas kecamatan		4,30	4,30	3,30	2,30	1,30	0	0	0			100	
9	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	110.87	100	100	..		100	AT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 (empat) terdiri dari:
  - a. Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa / kelurahan
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesejahteraan Perangkat Desa dan kepemimpinan Kepala Desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Sumber daya manusianya
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
  - b. Persentase tempat ibadah kondisi baik
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi dan pengajian
  - c. Persentase rumah tidak layak huni
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya bantuan stimulan dari pemerintah dan desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah status sosial masyarakat penerima bantuan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya kegotong-royongan / partisipasi masyarakat
  - d. Persentase penanganan laporan kejadian
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 (tiga) terdiri dari:
  - a. Persentase realisasi penerimaan PBB
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masi adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa

- b. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia ( SDM ) dari Aparat pemerintahan desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
  - c. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-desa tepat waktu
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia ( SDM ) dari Aparat pemerintahan desa
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
3. Capaian indikator dengan status upaya kerastidak ada.

### **2.2.2 Data Pokok**

Data Pokok pada Kecamatan Kledung terdiri dari 14 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, Data Pokok Bidang Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan, Data Pokok Bidang Persentase realisasi penerimaan PBB, Data Pokok Bidang Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset, Data Pokok Bidang Persentase laporan LPPD tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu, Data Pokok Bidang Persentase rumah tidak layak huni (RTLH), Data Pokok Bidang Persentase tempat ibadah kondisi baik, Data Pokok Bidang Persentase penanganan laporan kejadian, Angka kriminalitas kecamatan dan Data Pokok Bidang Desa tangguh bencana,dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan bobot penilaian 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik

Tabel 2.3  
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 2.4  
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung  
Tahun 2017-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2017	n.a
2	2018	n.a
3	2019	79,75
4	2020	79,95
5	2021	81,50

Sumber :Data IKM Kab. Temanggung

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Temanggung, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai konversi IKM antara 70,29 s/d 81,67. Dari tabel diatas dapat Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan.

## 2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.5  
 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan  
 di Kecamatan Kledung Tahun 2017-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.043	20.494	20.918	21.288	21.714	20.469
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.323	20.590	20.882	21.506	22.358	20.655
3	Persentase (%)	98	98	97	97	96	99,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung dalam kurun waktu lima tahun ini hanya terjadi satu pelanggaran disiplin perangkat desa di tahun 2018.

Tabel 2.6  
 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat  
 Di Kecamatan Kledung Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

NO	DESA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kledung		-	-	-	-
2	Batursari		1	-	-	-
3	Tlahap		-	-	-	-
4	Jambu		-	-	-	-
5	Canggal		-	-	-	-
6	Kwadungan Gunung		-	-	-	-
7	Kwadungan Jurang		-	-	-	-
8	Kruwisan		-	-	-	-

9	Jeketro		-	-	-	-
10	Paponan		-	-	-	-
11	Petarangan					
12	Tuksari		-	-	-	-
13	Kalirejo		-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kledung. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung tahun 2017 tidak ada (kosong). Pada tahun 2018 ada pelanggaran disiplin perangkat desa 1 orang di desa Baturesari, Tahun 2019 sampai dengan 2021 triwulan IV ini tidak ada perangkat desa di Kecamatan Kledung yang melanggar disiplin.

### 3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kledung

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-El) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. (Sumber :UU nomor 23 tahun 2006 tentang adminduk)

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Kledung.

Tabel 2.7  
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung  
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.043	20.494	20.918	21.288	21.714	20.469

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.323	20.590	20.882	21.506	22.358	20.655
3	Persentase (%)	98	98	97	97	96	99,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2017-2021 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk. Kepemilikan KTP pada triwulan II tahun 2021 cenderung menurun disebabkan adanya pandemi COVID 19. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.168 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8  
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Kledung  
Tahun 2021 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP El	Ket.
1.	Kledung	2.032	2.028	4	
2.	Kalirejo	698	692	6	
3.	Paponan	1.148	1.135	13	
4.	Jeketro	964	952	12	
5.	Kwadungan Gunung	1.628	1.615	13	
6.	Kwadungan	992	978	14	

	Jurang				
7.	Tlahab	3.008	2.983	25	
8.	Petarangan	2.886	2.867	19	
9.	Canggal	448	439	9	
10.	Jambu	691	679	12	
11.	Kruwisan	1.830	1.816	14	
12.	Batursari	1.398	1.375	23	
13.	Tuksari	2.932	2.910	22	
Jumlah		20.655	20.469	186	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021

#### 4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten /kota. (Dikutip dari wikipedia dan Dirjen Pajak). Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemic Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.9  
Persentase realisasi penerimaan PBB  
di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	431.538.740	517.983.763
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kledung	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	431.538.740	517.983.763
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber : Mapatda Kecamatan Kledung Tahun 2021

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung semakin meningkat dari tahun ke tahun karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa-desa.

Tabel 2.10  
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Kledung  
Tahun 2021 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Kledung	0	57.069.564	100	
2	Kalirejo	0	14.135.524	100	
3	Paponan	0	20.124.241	100	
4	Jeketro	0	33.811.432	100	
5	Kwadungan Gunung	0	47.072.432	100	
6	Kwadungan Jurang	0	28.972.669	100	
7	Tlahab	0	75.387.731	100	

8	Petarangan	0	63.642.276	100	
9	Canggal	0	14.208.098	100	
10	Jambu	0	11.820.336	100	
11	Kruwisan	0	46.550.229	100	
12	Batursari	0	19.122.458	100	
13	Tuksari	0	86.091.133	100	
JUMLAH TOTAL		0		<b>517.983.762</b>	<b>100</b>

Realisasi penerimaan dan persentase belum 100% karena terkendala adanya Pandemi Covid-19 sehingga diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

#### 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kledung Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung Tahun 2016– 2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	12 Desa	12 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	92,31%	92,31%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021 cenderung sama dari 100% menjadi 100%.

Tabel 2.12  
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
di Kecamatan Kledung Tahun 2016 – 2021 s.d Triwulan IV

No.	Desa	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kledung	V	V	V	V	V	V
2.	Kalirejo	V	V	V	V	V	V
3.	Paponan	V	V	V	V	V	V
4.	Jeketro	V	V	V	V	V	V
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	V	V
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	V	V
7.	Tlahab	V	V	V	V	V	V
8.	Petarangan	V	V	V	V	V	V
9.	Canggal	V	V	V	V	V	V
10.	Jambu	V	V	V	V	V	V
11.	Kruwisan	V	V	V	V	V	V
12.	Batursari	V	V	V	V	V	V
13.	Tuksari	V	V	V	V	V	V

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2017 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Kledung. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar 8,34%. Tahun 2018 sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , triwulan IV Tahun 2020 sebesar 25 % dan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 96 %

## 6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.13  
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2017 – 2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 cenderung stabil, hal ini mengandung arti bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan.

Tabel 2.14  
Daftar Pengesahan LPPD  
Di Kecamatan Kledung Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Kledung	10-01-2020	Tepat Waktu
2	Kalirejo	06-01-2020	Tepat Waktu
3	Paponan	03-01-2020	Tepat Waktu
4	Jeketro	04-01-2020	Tepat Waktu
5	Kwadungan Gunung	10-01-2020	Tepat Waktu
6	Kwadungan Jurang	07-01-2020	Tepat Waktu
7	Tlahab	08-01-2020	Tepat Waktu
8	Petarangan	21-01-2020	Tepat Waktu
9	Canggal	22-01-2020	Tepat Waktu
10	Jambu	09-01-2020	Tepat Waktu
11	Kruwisan	08-01-2020	Tepat Waktu
12	Batursari	20-01-2020	Tepat Waktu
13	Tuksari	24-01-2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

#### 7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15  
Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kledung  
Tahun 2017 – 2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2016 – 2020 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

#### 8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.16  
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu  
di Kecamatan Kledung Tahun 2017 – 2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa				
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 2.17  
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Kledung	8 Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020	Tepat Waktu
2.	Kalirejo	8 Tahun 2020 Tanggal 20 Oktober 2020	Tepat Waktu
3.	Paponan	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
4.	Jeketro	8 Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020	Tepat Waktu
5.	Kwadungan Gunung	8 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020	Tepat Waktu
6.	Kwadungan Jurang	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
7.	Tlahab	7 Tahun 2020 Tanggal 20 Oktober 2020	Tepat Waktu
8.	Petarangan	5 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
9.	Canggal	7 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
10.	Jambu	7 Tahun 2019 Tanggal 3 Nopember 2020	<b>Terlambat</b>
11.	Kruwisan	7 Tahun 2020 Tanggal 27 Oktober 2020	Tepat Waktu
12.	Batursari	6 Tahun 2020 Tanggal 21 Oktober 2020	Tepat Waktu
13.	Tuksari	6 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020	Tepat Waktu

Berdasarkan data diatas ada satu desa yang terlambat penyelesaian RKP-Desa yaitu desa Jambu, keterlambatan ini karena kualitas sumber daya manusia yang masih kurang.

### 9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dipergunakan oleh desa dalam menyusun APBD dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Khususnya dalam mengalokasikan dana / menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di desa masing masing. (kutipan Permendagri No. 20 Tahun 2018)

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.18  
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu  
di Kecamatan Kledung Tahun 2017 – 2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13 Desa				
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu ( pada bulan Februari di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 2.19  
Penyelesaian APB-Des Di Kecamatan Kledung

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Kledung	10 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
2.	Kalirejo	10 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
3.	Paponan	910Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4.	Jeketro	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5.	Kwadungan Gunung	11 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
6.	Kwadungan Jurang	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu

7.	Tlahab	8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
8.	Petarangan	7 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
9.	Canggal	8 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
10.	Jambu	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
11.	Kruwisan	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
12.	Batursari	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13.	Tuksari	9 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

#### 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 2.20  
Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
DiKecamatan Kledung Tahun 2017-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	978	924	795	695	
	Jumlah yang ditangani	398	54	129	100	
2.	Jumlah rumah tinggal	5.659	5.659	6.522	9.159	
3.	Persentase	17,28	16,33	12,19	7,59	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021 Triwulan IV

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel)

yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kledung pada Tahun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dikarenakan kesejahteraan masyarakat yang semakin terpenuhi.

### 11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 2.21  
Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung,  
Tahun 2017-2021 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	168	168	168	168	168	168
	- Islam	164	164	164	164	164	164
	- Kristen	4	4	4	4	4	4
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	168	168	168	168	168	168
3.	rumah ibadah kondisi baik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Kecamatan Kledung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih dalam kondisi bangunan baik 100%. Prosentase tempat ibadah kondisi baik untuk tahun 2019 sebesar 95,7 % sedangkan tahun 2020 triwulan II mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 95,7 %.

Tabel 2.22  
Tempat Ibadah diKecamatan Kledung  
Tahun 2021 Triwulan IV

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>MASJID</b>	<b>MUSOLA</b>	<b>GEREJA /CAPEL</b>	<b>WIHARA</b>	<b>KETER ANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Kledung	5	8	-	-	-
2	Kalirejo	5	6	-	-	-
3	Paponan	1	7	-	-	-
4	Jeketro	3	6	-	-	-
5	Kwadungan Gunung	2	11	1	-	-
6	Kwadungan Jurang	1	7	2	-	-
7	Tlahab	3	19	-	-	-
8	Petarangan	5	10	-	-	-
9	Canggal	1	5	-	-	-
10	Jambu	1	6	-	-	-
11	Kruwisan	1	9	-	-	-
12	Batursari	4	9	1	-	-
13	Tuksari	8	11	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		50	114	4	-	-
<b>J U M L A H KESELURUHAN</b>		<b>168</b>				

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021 Triwulan IV

## 12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Kledung Tahun 2017–2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	-	-	1	3	
2	Jumlah laporan kejadian	-	-	1	3	
3	Persentase	-	-	100	100	

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2021 cenderung meningkat.

Tabel 12.2  
Laporan Kejadian  
Di Kecamatan Kledung Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

NO	DESA	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kledung			1	1	
2	Kalirejo					
3	Paponan	1				
4	Jeketro			1	1	
5	Kwadungan Gunung					
6	Kwadungan Jurang	1		1	1	
7	Tlahab					
8	Petarangan			1		
9	Canggal	1				
10	Jambu			1		
11	Kruwisan					
12	Batursari					
13	Tuksari			1		

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

### 13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang

termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1  
Angka Kriminalitas Kecamatan  
di Kecamatan Kledung Tahun 2017-2021 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tindak Kriminal	3	0	6	3	
	- Jumlah kasus Narkoba	-	-	2	1	
	- Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	
	- Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	
	- Jumlah kasus Penganiayaan	1	-	1	1	
	- Jumlah kasus Pencurian	2	-	3	1	
	- Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	
	- Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	
2.	Jumlah Penduduk	22.793	23.175	23.878	24,147	
3.	Angka Kriminalitas	1,3	-	4,6	0,004	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kledung mengalami penurunan dari 1,8 % di tahun 2016, menjadi sebesar 1,3 % di tahun 2017, Sedangkan untuk tahun 2018 data

tidak tersedia, tahun 2019 sebesar 2,51 % dan Tahun 2020 Triwulan II angka kriminalitas sebesar 1,24 %.

Tabel 13.2  
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Kledung  
Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

NO	Desa	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kledung	-	-	-	1	-
2	Kalirejo	-	-	-	-	-
3	Paponan	-	-	-	-	-
4	Jeketro	-	-	-	1	-
5	Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-
6	Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-
7	Tlahab	-	-	-	-	-
8	Petarangan	-	-	-	-	-
9	Canggal	-	-	-	-	-
10	Jambu	-	-	-	-	-
11	Kruwisan	-	-	-	-	-
12	Batursari	-	-	-	-	-
13	Tuksari	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan IV

#### 14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau,

mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah Kecamatan Kledung Merupakan daerah rawan bencana terutama tanah longsor dan kekeringan (kekurangan air).

Desa yang selalu mengalami kekeringan atau kekurangan air di musim kemarau adalah desa Kledung dan desa Batusari, karena posisi desa yang berada di dataran tinggi diantara lereng gunung sumbing sindoro.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 14.1  
 Persentase Desa Tangguh Bencana  
 di Kecamatan Kledung Tahun 2016-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3	3	3	3	
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	7	7	7	7	
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	42,85	42,85	42,85	42,85	

Sumber: Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 42,85%, sedangkan Tahun 2020 Triwulan IV sebesar 42,85 %.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kledung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Kledung dari 26 indikator terdapat 15 indikator yang mencapai target 100 %, dan 11 indikator yang mencapai 96% - 99% .

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kledung antara lain :

- Tingkat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kledung pada seksi seksi yang belum maksimal;
- Tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah perlu kesabaran karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham aturan-aturan yang telah ditetapkan tetapi tetap minta pelayanan yang cepat dan tepat/ maksimal padahal pelayanan yang menggunakan aplikasi/ jaringan internet yang sering terganggu dengan jeleknya signal;
- Pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk ditindak lanjuti dan di tingkatkan dalam perumusan program dan prioritas kegiatan;
- Adanya wabah pandemi Covid -19 di luar perencanaannya sebelumnya

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar selalu adanya koordinasi antara Pimpinan selaku PPK dengan PPTK selaku pelaksana kegiatan .

#### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Koordinasi Pemerintahan menjadi fasilitasi Tata Pemerintahan;
- b. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat menjadi Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- d. Koordinasi bidang Pemerintahan menjadi Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan;

- e. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan menjadi Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- f. Forum koordinasi pimpinan Kecamatan menjadi sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum menjadi koordinasi/senergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian RI;
- h. Fasilitasi PKK menjadi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- i. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan menjadi penhusunan dokumen perencanaan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.28**  
**Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023**

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	UNSUR KEWILAYAHAN													
	<b>KECAMATAN</b>													<b>DAU</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					<b>2.175.223.581</b>		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kledung				<b>2.175.223.581</b>	
		Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%				Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%		
		Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%				Kec. Kledung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%		

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14	org/bln	1.867.380.581	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14	org/bln	1.867.380.581	<b>DAU</b>
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kledung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.221.400	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kledung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	2.221.400	<b>DAU</b>
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kledung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	5.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kledung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	11	Paket	5.000.000	<b>DAU</b>
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kledung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	8.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kledung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	8.000.000	<b>DAU</b>
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	15.000.000	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	15.000.000	<b>DAU</b>
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	<b>DAU</b>
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	2.000.000	8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	Unit	2.000.000	<b>DAU</b>
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	<b>DAU</b>

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	22.200.000		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	22.200.000	<b>DAU</b>
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	92.571.000		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan:	12	Laporan	92.571.000	<b>DAU</b>
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kledung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	28.000.000		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kledung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	28.000.000	<b>DAU</b>
13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kledung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	0		13	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kledung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	unit	0	<b>DAU</b>
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.000.000		14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit	2.000.000	<b>DAU</b>
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3	Unit	2.000.000		15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kledung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2	Unit	2.000.000	<b>DAU</b>

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kledung	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	<b>82.814.900</b>			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kledung	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	100	%	<b>82.814.900</b>	<b>DAU</b>
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%					Kec. Kledung	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		<b>DAU</b>
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	laporan	82.814.900		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kledung	Terlaksananya Koordinasi Intensifikasi PBB	12	Bulan	82.814.900	<b>DAU</b>
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	<b>15.835.000</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Kledung	Persentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100	%	<b>15.835.000</b>	<b>DAU</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan Lomba Desa,, Pembinaan	12	Laporan	15.835.000			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK )	12	Laporan	15.835.000	<b>DAU</b>

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

			Lembaga Desa, Pendampingan Desa Binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK))											
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	13.200.000		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kledung	Persentase penanganan laporan kejadian	100	%	13.200.000	DAU
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Kledung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13.200.000	DAU
	<b>JUMLAH DAU</b>					<b>2.175.223.581</b>		<b>JUMLAH DAU</b>					<b>2.175.223.581</b>	<b>DAU</b>

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Kledung. Namun dalam proses ini Kecamatan Kledung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.29

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	-	-	-	-	-

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kledung ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.30

Daftar Inovasi Perangkat Daerah

2020

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	Inovasi Wisata Desa Kledung	TKSK, Komunitas Peduli Kemiskinan, lembaga2 <i>charity</i>		Pengembangan Wisata Pendakian dan Wisata Embung di desa Kledung	Gerakan komunitas lokal	Penambahan lapangan kerja, Peningkatan pendapatan desa, Pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan	Grasindo - 2019

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Kledung nihil.

Tabel 2.31

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan Nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan Nasional yang diampu oleh Kecamatan Kledung lebih pada menuangkan kebijakan Nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kledung**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Kledung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kledung dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Kledung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2022

**VISI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-		
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa		Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu	%	100	100
				Persentase Kegiatan Yang Selesai Tepat Waktu	%	100	100
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/ kelurahan	%	1	1
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat		Angka kriminalitas kecamatan			
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
			Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80	100

Sumber : Renstra Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Kledung Tahun 2019-2023.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Kecamatan Kledung Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Kecamatan Kledung TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			( + / - )
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		A	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
a	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		a	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>1.867.380.581</b>	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>1.867.380.581</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.867.380.581		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.867.380.581	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>44.221.400</b>	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>44.221.400</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.221.400		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.221.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>119.771.700</b>	f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>119.771.700</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.571.700		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.571.700	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000	g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>82.814.900</b>	2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>82.814.900</b>
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.814.900		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.814.900
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>15.835.000</b>	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>15.835.000</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.835.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.835.000
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>13.200.000</b>	4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>13.200.000</b>
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13.200.000
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.000.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indones	12.000.000
5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	0	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daera	0
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	0		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertik	0

6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	0	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.175.223.581</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>2.175.223.581</b>

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif Tahun 2023 antara Renja dan RKPD adalah sama tidak ada perubahan.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN PERENCANAAN 2023**

**PD : KECAMATAN KLEDUNG**

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi Anggaran	Realisasi	%		
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Su. Keg.													
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
										2.175.223.581	2.175.223.581	1.888.066.999	1.985.749.300	1.964.632.685	98,94	2.301.231.401	DAU
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.063.373.681	2.063.373.681	1.587.735.099	1.658.153.474	1.637.480.999	98,75	1.868.380.581	DAU
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.867.380.581	1.867.380.581	1.587.735.099	1.658.153.474	1.637.480.999	98,75	1.868.380.581	DAU
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	15/12	Orang/bulan	1.867.380.581	1.867.380.581	1.587.735.099	1.658.153.474	1.637.480.999	98,75	1.868.380.581	DAU
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah					44.221.400	44.221.400	45.000.000	41.267.800	41.171.393	99,77	48.000.000	

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	7	Paket	2.221.400	2.221.400	3.000.000	4.209.300	4.209.300	100,00	5.000.000	DAU
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000	7.573.500	7.573.500	100,00	10.000.000	DAU
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	4.800.000	4.800.000	100,00	8.000.000	DAU
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kledung	12	Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	13.885.000	13.885.000	100,00	15.000.000	DAU
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	3	Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.800.000	10.703.593	99,11	10.000.000	DAU
7	01	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>119.771.700</b>	<b>119.771.700</b>	<b>123.880.000</b>	<b>115.179.757</b>	<b>114.847.849</b>	<b>99,71</b>	<b>120.271.700</b>	<b>DAU</b>
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	12	Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.970.000	3.970.000	100,00	5.500.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Laporan	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.076.029	99,44	22.200.000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Laporan	92.571.700	92.571.700	96.680.000	89.009.757	88.801.820	99,77	92.571.700	DAU

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

7	01	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>55.889.869</b>	<b>55.884.044</b>	<b>99,99</b>	<b>34.000.000</b>	<b>DAU</b>
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Kledung	7	Unit	28.000.000	28.000.000	28.000.000	27.999.600	27.994.344	99,98	28.000.000	DAU
7	01	01	209	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kledung	2	Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.695.264	2.695.000	99,99	2.000.000	DAU
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	22.499.700	22.499.700	100,00	2.000.000	DAU
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kec. Kledung	3	Unit	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.695.305	2.695.000	99,99	2.000.000	DAU
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>82.814.900</b>	<b>82.814.900</b>	<b>66.251.900</b>	<b>55.435.200</b>	<b>55.435.200</b>	<b>100,00</b>	<b>129.151.120</b>	



RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	1	Laporan	15.835.000	15.835.000	20.000.000	13.278.400	13.278.400	100,00	103.928.000	DAU
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					13.200.000	13.200.000	13.200.000	29.229.800	29.229.800	100,00	22.020.000	DAU
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	100,00	14.520.000	DAU
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	12	Laporan	13.200.000	13.200.000	13.200.000	23.200.000	23.200.000	100,00	14.520.000	DAU
7	01	04	704		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					-	-	-	6.029.800	6.029.800	100,00	14.520.000	DAU

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

7	01	04	704	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kledung	12	Laporan	-	-	-	6.029.800	6.029.800	100,00	14.520.000	DAU
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					-	-	-	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>22.020.000</b>	<b>DAU</b>
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		12	Laporan	-	-	-	5.120.000	5.120.000	100,00	14.520.000	DAU	
7	01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	<b>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</b>		12	Laporan	-	-	-	5.120.000	5.120.000	100,00	14.520.000	DAU
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					-	-	-	<b>12.195.000</b>	<b>12.185.000</b>	<b>99,92</b>	<b>22.020.000</b>	<b>DAU</b>
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-	-	-	5.534.000	5.527.000	99,87	14.520.000	DAU

RENJA 2023 \_KECAMATAN KLEDUNG

7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>		12	Laporan	-	-	-	5.534.000	5.527.000	99,87	14.520.000	DAU
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>		12	Laporan	-	-	-	6.661.000	6.658.000	99,95	14.520.000	DAU
										<b>2.175.223.581</b>	<b>2.175.223.581</b>	<b>1.888.066.999</b>	<b>1.985.749.300</b>	<b>1.964.632.685</b>	<b>98,94</b>	<b>2.181.681.987</b>	

**CAMAT KLEDUNG**

**SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I/ IV b  
NIP.19700426 199003 1 001

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Kledung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Kledung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Kledung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,68%, realisasi Belanja Modal sebesar 0%, belanja barang dan jasa sebesar 99,86% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Kledung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.175.223.581,- yang terdiri dari 4 Program antara lain Program penunjang urusan pemerintah daerah; Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah

dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Kledung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Kledung, 24 Mei 2022

**CAMAT KLEDUNG**

**SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk.I / IV b

NIP. 19700426 199003 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kledung dapat menyusun Rencana Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kledung tahun 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2022.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung Tahun 2022.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2022 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 September 2021

CAMAT KLEDUNG

**SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700426 199003 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kledung dapat menyusun Rencana Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kledung tahun 2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Kledung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kledung selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2023.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2023.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kledung Tahun 2023.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kledung Tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Kledung Tahun 2023 dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 24 Mei 2022

CAMAT KLEDUNG

**SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700426 199003 1 001

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Anggaran 2022	Alokasi	Realisasi	%	Rencana 2024	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						1,867,380,581	1,587,735,099	1,658,153,474	1,637,480,999	98.75	1,867,380,581	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kecamatan Kledung	12	bulan	1,867,380,581	1,587,735,099	1,658,153,474	1,637,480,999	98.75	1,867,380,581	DAU
						44,221,400	45,000,000	41,267,800	41,171,393	99.77	48,000,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Kledung	12	bulan	2,221,400	3,000,000	4,209,300	4,209,300	100.00	5,000,000	DAU
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Kledung	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kecamatan Kledung	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Kledung	12	bulan	9,000,000	9,000,000	7,573,500	7,573,500	100.00	10,000,000	DAU
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Kledung	12	bulan	8,000,000	8,000,000	4,800,000	4,800,000	100.00	8,000,000	DAU
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kecamatan Kledung	12	bulan	15,000,000	15,000,000	13,885,000	13,885,000	100.00	15,000,000	DAU
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kecamatan Kledung	12	bulan	10,000,000	10,000,000	10,800,000	10,703,593	99.11	10,000,000	DAU
						119,771,700	123,880,000	115,179,757	114,847,849	99.71	119,771,700	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kecamatan Kledung	12	bulan	5,000,000	5,000,000	3,970,000	3,970,000	100.00	5,000,000	DAU
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Kledung	12	bulan	22,200,000	22,200,000	22,200,000	22,076,029	99.44	22,200,000	DAU
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Kledung	12	bulan	92,571,700	96,680,000	89,009,757	88,801,820	99.77	92,571,700	DAU
						32,000,000	32,000,000	33,394,169	33,379,344	99.96	35,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kecamatan Kledung	12	bulan	28,000,000	28,000,000	27,999,600	27,994,344	99.98	30,000,000	DAU







Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Laporan						0	0	5,120,000	5,120,000	100.00	5,120,000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang												
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang												
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang												
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang												
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan												
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat												
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen						0	0	5,120,000	5,120,000	100.00	5,120,000	DAU
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen												
								0	0	12,195,000	12,185,000	99.92	12,300,000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen												
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Kecamatan Kledung	13	Desa			0	0	5,534,000	5,527,000	99.87	5,500,000	DAU



Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan											
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan											
						1,987,152,281	1,711,615,099	0	0	#DIV/0!	0	DAU	
						1,987,152,281	1,711,615,099	0	0	#DIV/0!	0	DAU	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN PERENCANAAN 2023  
KECAMATAN KLEDUNG**

KODE REKENING				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran Tahun 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Sum ber Dana	
						Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi Anggaran	Realisasi	%			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
									2,165,473,581	1,888,066,999	1,985,749,300	1,964,632,685	98.94	2,301,231,401	DAU	
7	01	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			%		2,063,373,681	1,587,735,099	1,658,153,474	1,637,480,999	98.75	1,868,380,581	DAU	
7	01	01	202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					1,867,380,581	1,587,735,099	1,658,153,474	1,637,480,999	98.75	1,868,380,581	DAU	
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kledung	15/12	Orang/bulan	1,867,380,581	1,587,735,099	1,658,153,474	1,637,480,999	98.75	1,868,380,581	DAU
7	01	01	206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					44,221,400	45,000,000	41,267,800	41,171,393	99.77	48,000,000		
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	7	Paket	2,221,400	3,000,000	4,209,300	4,209,300	100.00	5,000,000	DAU
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Paket	9,000,000	9,000,000	7,573,500	7,573,500	100.00	10,000,000	DAU
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Paket	8,000,000	8,000,000	4,800,000	4,800,000	100.00	8,000,000	DAU
7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kledung	12	Laporan	15,000,000	15,000,000	13,885,000	13,885,000	100.00	15,000,000	DAU
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kledung	3	Laporan	10,000,000	10,000,000	10,800,000	10,703,593	99.11	10,000,000	DAU
7	01	01	208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					119,771,700	123,880,000	115,179,757	114,847,849	99.71	120,271,700	DAU	
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kledung	12	Laporan	5,000,000	5,000,000	3,970,000	3,970,000	100.00	5,500,000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Laporan	22,200,000	22,200,000	22,200,000	22,076,029	99.44	22,200,000	DAU
7	01	01	208	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kledung	12	Laporan	92,571,700	96,680,000	89,009,757	88,801,820	99.77	92,571,700	DAU
7	01	01	209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					32,000,000	32,000,000	55,889,869	55,884,044	99.99	34,000,000	DAU	

7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Kledung	7	Unit	28,000,000	28,000,000	27,999,600	27,994,344	99.98	28,000,000	DAU
7	01	01	209	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kledung	2	Unit	2,000,000	2,000,000	2,695,264	2,695,000	99.99	2,000,000	DAU
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	Unit	2,000,000	2,000,000	22,499,700	22,499,700	100.00	2,000,000	DAU
7	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kec. Kledung	3	Unit	2,000,000	2,000,000	2,695,305	2,695,000	99.99	2,000,000	DAU
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>82,814,900</b>	<b>66,251,900</b>	<b>55,435,200</b>	<b>55,435,200</b>	<b>100.00</b>	<b>129,151,120</b>	
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					-	-	3,716,400	3,716,400	100.00	124,651,120	DAU
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	-	3,716,400	3,716,400	100.00	124,651,120	DAU
7	01	02	204		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>					<b>82,814,900</b>	<b>66,251,900</b>	<b>51,718,800</b>	<b>51,718,800</b>	<b>100.00</b>	<b>124,651,120</b>	<b>DAU</b>
7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kledung	7	Laporan	82,814,900	66,251,900	51,718,800	51,718,800	100.00	124,651,120	DAU
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					<b>6,085,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>13,278,400</b>	<b>13,278,400</b>	<b>100.00</b>	<b>103,928,000</b>	<b>DAU</b>
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					<b>6,085,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>13,278,400</b>	<b>13,278,400</b>	<b>100.00</b>	<b>103,928,000</b>	<b>DAU</b>
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	1	Laporan	6,085,000	20,000,000	13,278,400	13,278,400	100.00	103,928,000	DAU
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>29,229,800</b>	<b>29,229,800</b>	<b>100.00</b>	<b>22,020,000</b>	<b>DAU</b>
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					<b>13,200,000</b>	<b>13,200,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>100.00</b>	<b>14,520,000</b>	<b>DAU</b>

7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kledung	12	Laporan	13,200,000	13,200,000	23,200,000	23,200,000	100.00	14,520,000	DAU
7	01	04	704		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah</b>					-	-	6,029,800	6,029,800	100.00	14,520,000	DAU
7	01	04	704	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kledung	12	Laporan	-	-	6,029,800	6,029,800	100.00	14,520,000	DAU
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					-	-	5,120,000	5,120,000	100.00	22,020,000	DAU
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			12	Laporan	-	-	5,120,000	5,120,000	100.00	14,520,000	DAU
7	01	05	201	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	<b>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</b>		12	Laporan	-	-	5,120,000	5,120,000	100.00	14,520,000	DAU
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					-	-	12,195,000	12,185,000	99.92	22,020,000	DAU
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					-	-	5,534,000	5,527,000	99.87	14,520,000	DAU
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>		12	Laporan	-	-	5,534,000	5,527,000	99.87	14,520,000	DAU
7	01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>		12	Laporan	-	-	6,661,000	6,658,000	99.95	14,520,000	DAU
										2,165,473,581	1,888,066,999	1,985,749,300	1,964,632,685	98.94	2,181,681,987	

CAMAT KLEDUNG

**SUBKHAN ASHADI,S.Sos,M.Si**  
Pembina TK.I  
NIP. 19700426 199003 1 001